



## Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Desa Bandar Sakti, Kabupaten Lampung Tengah

Adelia Putri<sup>1</sup>, Heru Wahyudi<sup>2</sup>, Resha Moniyana<sup>3</sup>, Arivina Ratih Y.T.<sup>4</sup>, Prayudha Ananta<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Juni 15, 2026

Revised Juni 15, 2026

Accepted Juni 15, 2026

#### Kata Kunci:

Dana Desa,  
Pengelolaan Dana Desa,  
Pembangunan ekonomi Desa,  
BUMDes,  
Pemberdayaan Masyarakat,  
Tenaga Kerja Lokal

#### Keywords:

Village Funds,  
Village Fund Management,  
Village Economic Development,  
BUMDes,  
Community Empowerment,  
Local Workforce

### ABSTRAK

Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan serta dampaknya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan Dana Desa dan menganalisis kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di Desa Bandar Sakti, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Tingkat kesesuaian pada tahap perencanaan mencapai 90%, sedangkan tahap pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban mencapai 100%. Pengelolaan Dana Desa juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi desa, yang ditunjukkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi, berkembangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta bertambahnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

### ABSTRACT

The Village Fund is a government policy aimed at accelerating development and improving the welfare of rural communities. However, the success of this program is largely determined by the quality of its management and its impact on the community's economic development. This study aims to examine the management of the Village Fund and analyze its contribution to economic development in Bandar Sakti Village, Central Lampung Regency, in 2024. The study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. While data validity was tested using source triangulation and technical triangulation. The results show that the management of the Village Fund has been implemented through the stages of planning, implementation, supervision, and accountability in accordance with applicable regulations. The level of compliance at the planning stage reached 90%, while the implementation, supervision, and accountability stages reached 100%. Village Fund management also has a positive impact on village economic development, as demonstrated by improved economic

---

*infrastructure quality, the development of community empowerment activities through Village-Owned Enterprises (BUMDes), and increased employment opportunities for local communities. These findings indicate that the Village Fund plays a significant role in supporting economic activity and encouraging improved village community welfare.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Adelia Putri  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung  
Lampung, Indonesia  
Email: [adhelliasari@gmail.com](mailto:adhelliasari@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional karena desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah [1]. Desa dipandang sebagai fondasi utama pembangunan nasional karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pedesaan [2]. Oleh karena itu, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat [3].

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan desa adalah melalui program Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [4]. Dana Desa diberikan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa [5]. Kehadiran Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kemandirian desa serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat desa [6].

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat [7]. Melalui kebijakan Dana Desa, pemerintah memberikan ruang bagi desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa [8]. Dana Desa juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal desa [9].

Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, partisipatif, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban [10]. Pengelolaan yang baik menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa dan efektivitas penggunaan Dana Desa [11].

Pembangunan ekonomi desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal [12]. Infrastruktur ekonomi seperti jalan desa, jalan usaha tani, dan sarana ekonomi lainnya memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat [13]. Selain itu, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan pendapatan desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat [14].

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat [15]. Pengembangan BUMDes dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha desa yang produktif [16]. Oleh karena itu,

keberadaan BUMDes menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan [17].

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal [18]. Melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja, Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat serta memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa [19].

Pembangunan ekonomi desa pada dasarnya ditandai oleh meningkatnya akses terhadap sarana ekonomi, berkembangnya kegiatan usaha masyarakat, serta bertambahnya kesempatan kerja. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya program pembangunan, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi desa [20]. Dalam konteks tersebut, pengelolaan Dana Desa menjadi penting untuk dikaji karena berhubungan langsung dengan upaya peningkatan infrastruktur ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja lokal [21].

Desa Bandar Sakti merupakan salah satu desa di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah yang menerima Dana Desa setiap tahunnya [22]. Pada tahun 2024, penggunaan Dana Desa di Desa Bandar Sakti difokuskan pada pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. Program pembangunan yang dilakukan meliputi pembangunan jalan lapisan penetrasi, rabat beton, usaha cucian steam hidrolik, pembangunan ruko, dan program peternakan. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa [23].

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi desa. Penelitian Andi Samsir (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bone berjalan efektif karena dilakukan secara partisipatif dan transparan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat [24]. Penelitian Ihdina Dewi (2021) juga menunjukkan bahwa Dana Desa berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa melalui musyawarah desa dan pelaksanaan program yang tepat sasaran [25].

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh M. Rimawan, Alwi, Ismunandar, dan Fenny Aryani (2020) menunjukkan bahwa Dana Desa memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun belum optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan [26]. Penelitian Ratna Purnamasari, Ivana Nina Esterlin Barus, dan Umi Kulsum (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa cukup efektif dalam mencapai target pembangunan desa, namun masih memerlukan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran [27].

Selain itu, penelitian Shenia Nilla Sari dan M. Faisal Abdullah (2019) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, keterlambatan pencairan anggaran, dan tata kelola keuangan desa [28]. Penelitian Putri Agustina dan Sutrisno (2019) juga menunjukkan bahwa Dana Desa efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan usaha pertanian dan aktivitas perdagangan masyarakat [29].

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai Dana Desa lebih banyak berfokus pada pengukuran efektivitas pengelolaan Dana Desa secara kuantitatif. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada proses pengelolaan Dana Desa berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi desa secara kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Sakti Kabupaten Lampung Tengah.

## **2. METODE**

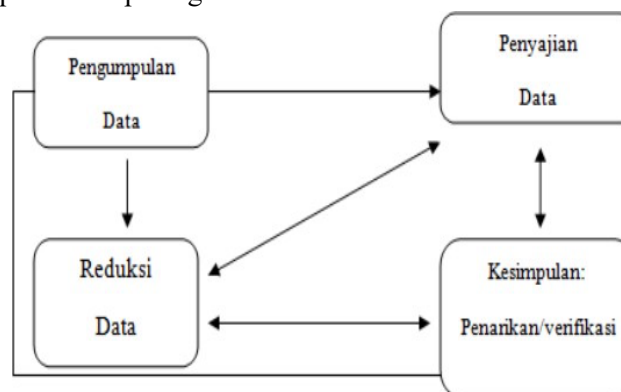
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pengelolaan Dana Desa berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara

mendalam [30]. Penelitian dilakukan di Desa Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Sakti pada tahun 2024. Pengelolaan Dana Desa dianalisis berdasarkan empat tahapan utama yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban [10]. Selain fokus pada proses pengelolaan Dana Desa, penelitian ini juga memfokuskan pada dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi desa melalui indikator pembangunan infrastruktur ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja lokal [31].

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan Dana Desa [32]. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa seperti APBDes, RKPDes, laporan realisasi Dana Desa, dan dokumen pendukung lainnya [30]. Penggunaan data primer dan sekunder dilakukan untuk memperoleh gambaran penelitian yang lebih komprehensif [33].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi [34]. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Pendamping Desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat Dana Desa. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik [30]. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi [35]. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian [34].

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (*verification*). Proses analisis data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Analisis Model Miles & Huberman

Sumber: Diadaptasi dari Miles & Huberman (2014).

Berdasarkan gambar tersebut, penelitian dilaksanakan melalui tahapan yang saling berhubungan dan berlangsung secara berkelanjutan. Proses penelitian tidak berjalan secara linier, melainkan dilakukan secara berulang mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan [36]. Setiap tahapan menjadi dasar bagi tahapan berikutnya sehingga pengumpulan dan analisis data dilakukan secara simultan untuk memperoleh temuan yang mendalam [37]. Tahapan analisis tersebut mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman [38].

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Sakti Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, pengelolaan Dana Desa juga memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi desa yang terlihat dari peningkatan infrastruktur ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja lokal. Adapun ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian

Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Perencanaan	Perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Tingkat kesesuaian mencapai 90%.
Pelaksanaan	Program yang telah ditetapkan dalam APBDes direalisasikan sesuai rencana, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan unit usaha desa. Tingkat kesesuaian mencapai 100%.
Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, pendamping desa, dan masyarakat melalui pemantauan pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran. Tingkat kesesuaian mencapai 100%.
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan menggunakan Siskeudes serta publikasi realisasi kegiatan kepada masyarakat. Tingkat kesesuaian mencapai 100%.
Infrastruktur Ekonomi	Pembangunan jalan usaha tani, jalan lapen, dan rabat beton meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta memperlancar aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian.
Pemberdayaan Ekonomi	Pengembangan BUMDes melalui usaha steam hidrolik, ruko usaha, lapangan mini soccer, dan peternakan memberikan peluang usaha dan meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat.
Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Program padat karya dan unit usaha BUMDes membuka peluang kerja bagi masyarakat desa. Usaha steam hidrolik menyerap sekitar 3–6 tenaga kerja dan lapangan mini soccer menyerap sekitar 5 tenaga kerja lokal, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Berdasarkan Tabel 1, pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Sakti secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan pengelolaan menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi, dimana tahap pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban mencapai 100%, sedangkan tahap perencanaan mencapai 90% karena partisipasi masyarakat masih didominasi melalui sistem perwakilan. Selain menunjukkan kesesuaian terhadap regulasi, pengelolaan Dana Desa juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi desa. Dampak tersebut tercermin pada peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi, berkembangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, serta bertambahnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Temuan ini mengindikasikan bahwa Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan fisik, tetapi juga berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

### 3.2 Pembahasan

#### 3.2.1. Perencanaan Dana Desa

Tahap perencanaan Dana Desa di Desa Bandar Sakti telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat. Hasil musyawarah tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Program yang direncanakan pada tahun 2024 difokuskan pada pembangunan infrastruktur ekonomi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan desa.

Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif [39]. Dalam pengelolaan Dana Desa, perencanaan berfungsi sebagai dasar dalam menentukan prioritas program pembangunan agar penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat [4].

Berdasarkan hasil analisis, tahap perencanaan memperoleh tingkat kesesuaian sebesar 90%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator perencanaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun partisipasi masyarakat masih dilakukan melalui sistem perwakilan, aspirasi masyarakat tetap terakomodasi dalam penyusunan program. Hal ini tercermin dari prioritas pembangunan yang diarahkan pada perbaikan jalan usaha tani, jalan lapen, serta pengembangan unit usaha BUMDes yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tahap perencanaan telah menjadi landasan yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan program Dana Desa dan pembangunan ekonomi Desa Bandar Sakti.

### **3.2.2 Pelaksanaan Dana Desa**

Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bandar Sakti Tahun 2024 telah direalisasikan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam APBDes. Kegiatan yang dilaksanakan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan jalan lapisan penetrasi (lapen), rabat beton, jalan usaha tani, serta pengembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa mengutamakan sistem swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tahap pelaksanaan merupakan proses realisasi program dan anggaran yang telah direncanakan dengan tetap memperhatikan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal, sementara keterlibatan pihak ketiga hanya dilakukan pada pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari pelaksanaan program Dana Desa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan [40]. Selain menghasilkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, pelaksanaan program juga memberikan tambahan pendapatan melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Dari perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Berdasarkan hasil analisis, tahap pelaksanaan memperoleh tingkat kesesuaian sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pelaksanaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari kesesuaian program dengan APBDes, penerapan sistem swakelola, pelaksanaan padat karya, hingga keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.

### **3.2.3 Pengawasan Dana Desa**

Tahap pengawasan Dana Desa di Desa Bandar Sakti melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, serta masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan di lapangan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping desa secara aktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program melalui evaluasi laporan kegiatan dan kunjungan lapangan secara berkala. Selain memberikan pengawasan, pendamping desa juga berperan dalam memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan. Di sisi lain, BPD menjalankan fungsi pengawasan dengan memantau perkembangan kegiatan serta memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan turut menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Keterlibatan masyarakat memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Temuan ini sejalan dengan konsep pengawasan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan desa [41].

Berdasarkan hasil analisis, tahap pengawasan memperoleh tingkat kesesuaian sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Efektivitas pengawasan juga tercermin dari kondisi hasil pembangunan yang masih berfungsi dengan baik dan belum mengalami kerusakan yang signifikan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif telah mendukung terciptanya pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberhasilan pembangunan desa.

### **3.2.4 Pertanggungjawaban Dana Desa**

Tahap pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Bandar Sakti telah dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sarana pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Penggunaan sistem tersebut membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan kegiatan secara lebih terstruktur serta sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

Dalam proses penyusunan laporan, pemerintah desa melengkapi setiap kegiatan dengan berbagai dokumen pendukung, seperti rencana anggaran biaya, bukti transaksi, berita acara, serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan.

Selain aspek administrasi, pemerintah desa juga berupaya menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai realisasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan disampaikan melalui baliho desa serta media sosial, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penggunaan Dana Desa dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa BPD menjalankan fungsi evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pemerintah desa sebelum laporan tersebut disahkan. Proses evaluasi dilakukan dengan mencocokkan laporan yang disampaikan dengan kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Berdasarkan hasil analisis, tahap pertanggungjawaban memperoleh tingkat kesesuaian sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan telah mendukung terciptanya pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### 3.2.5 Dampak Dana Desa Terhadap Infrastruktur Ekonomi

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Sakti memberikan dampak positif terhadap pengembangan infrastruktur ekonomi desa. Pada tahun 2024, penggunaan Dana Desa difokuskan pada pembangunan jalan usaha tani, jalan lapisan penetrasi (lapen), dan rabat beton yang mendukung aktivitas pertanian serta mobilitas masyarakat. Perbaikan infrastruktur tersebut mempermudah akses menuju lahan pertanian, memperlancar distribusi hasil panen, dan meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembangunan jalan turut mendorong meningkatnya mobilitas ekonomi di desa. Kondisi jalan yang lebih baik memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha dan distribusi barang, bahkan mulai mendorong munculnya pedagang keliling yang lebih aktif beroperasi di wilayah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga mendukung berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, manfaat pembangunan infrastruktur belum dirasakan secara merata karena masih terdapat beberapa ruas jalan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Oleh karena itu, meskipun Dana Desa telah berkontribusi dalam memperkuat infrastruktur ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pembangunan tetap diperlukan agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh masyarakat Desa Bandar Sakti.

### 3.2.6 Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bandar Sakti tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMDes Karya Sakti yang mulai beroperasi secara aktif sejak tahun 2023. Melalui lembaga tersebut, pemerintah desa mengembangkan beberapa unit usaha yang meliputi usaha cucian steam hidrolis, 4 unit ruko usaha, lapangan mini soccer, serta program peternakan bebek. Berbagai kegiatan tersebut dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan sumber pendapatan desa.

Sebelum program pemberdayaan dijalankan, peluang masyarakat untuk mengakses fasilitas usaha dan memperoleh tambahan pendapatan masih relatif terbatas. Sebagian pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonominya secara mandiri dengan sarana yang sederhana dan akses usaha yang terbatas. Setelah unit-unit usaha BUMDes dikembangkan, masyarakat memperoleh ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat unit ruko yang dibangun telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk kegiatan usaha. Selain itu, usaha cucian steam hidrolis mampu menyerap 6 tenaga kerja lokal, sementara pengelolaan lapangan mini soccer dan kegiatan usaha lainnya turut melibatkan masyarakat setempat, khususnya pemuda desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai pengelola usaha desa, tetapi juga menjadi sarana dalam menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Kartasasmita (2021), pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki [42]. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan unit usaha BUMDes telah memberikan akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dibandingkan sebelum program dilaksanakan. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Sakti dapat dinilai telah berkontribusi dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi desa secara berkelanjutan.

### 3.2.7 Dampak Dana Desa Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Salah satu dampak ekonomi yang terlihat dari pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Sakti adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal. Pelaksanaan berbagai program pembangunan dan

pengembangan unit usaha desa memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi yang didanai melalui Dana Desa. Kebijakan pemerintah desa yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat turut memperluas manfaat program bagi masyarakat. Sebelum pelaksanaan program Dana Desa, kesempatan kerja di lingkungan desa masih relatif terbatas dan sebagian masyarakat belum memiliki pekerjaan yang tetap. Kondisi tersebut mulai mengalami perubahan setelah dilaksanakannya berbagai kegiatan pembangunan dan pengembangan usaha desa. Pembangunan jalan lapisan penetrasi (lapen) sepanjang lebih dari 700 meter dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja. Selain itu, unit usaha cucian steam hidrolik yang dikelola BUMDes mampu menyerap sekitar 3–6 tenaga kerja lokal, sedangkan pengelolaan lapangan mini soccer membuka kesempatan kerja bagi sekitar 5 orang masyarakat sebagai pengelola dan petugas pendukung kegiatan.

Menurut teori Keynesian, belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (Mankiw, 2016). Dalam konteks ini, Dana Desa berperan sebagai instrumen yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat [43]. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, semakin besar pula potensi peningkatan pendapatan dan perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Selain membuka kesempatan kerja melalui kegiatan pembangunan, pemerintah desa juga mengembangkan program peternakan kambing yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya menambah sumber penghasilan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah program Dana Desa dijalankan, akses masyarakat terhadap pekerjaan dan kegiatan ekonomi produktif menjadi lebih luas dibandingkan kondisi sebelumnya. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja lokal menjadi salah satu kontribusi nyata Dana Desa dalam mendukung pembangunan ekonomi Desa Bandar Sakti.

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi desa melalui peningkatan infrastruktur ekonomi, penguatan pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja. Meskipun demikian, optimalisasi manfaat program masih memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat serta pengembangan program ekonomi yang lebih berkelanjutan agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkesinambungan.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Sakti Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan memperoleh tingkat kesesuaian sebesar 80%, sedangkan tahap pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban masing-masing mencapai 100%. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah berjalan dengan baik, meskipun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih perlu ditingkatkan agar prinsip partisipatif dapat terlaksana secara lebih optimal.

Dari aspek pembangunan ekonomi, Dana Desa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan infrastruktur ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja lokal. Pembangunan jalan usaha tani, jalan lapen, dan rabat beton mendukung kelancaran mobilitas serta distribusi hasil pertanian. Selain itu, pengembangan BUMDes melalui unit usaha seperti ruko, cucian steam hidrolik, lapangan mini soccer, dan program peternakan telah memperluas peluang usaha dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif. Dana Desa juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya dan pengelolaan unit usaha desa yang melibatkan tenaga kerja lokal.

Secara keseluruhan, Dana Desa tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bandar Sakti.

## REFERENSI

- [1] I. P. Rahayu, N. Yani, R. W. Putri, and M. Panorama, “Efektivitas Kebijakan Dana Desa bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten OKU Timur,” *SINOMIKA Journal*, vol. 1, no. 3, pp. 277–286, 2022, doi: 10.54443/sinomika.v1i3.262.
- [2] A. M. Aritonang, E. S. Pasaribu, P. R. Siburian, and J. Ivanna, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,” *Journal of Administrative and Social Science*, vol. 6, no. 2, pp. 262–268, 2025, doi: 10.55606/jass.v6i2.2037.
- [3] R. Hilmawan et al., “Rural Development from Village Funds, Village-Owned Enterprises, and Village Original Income,” *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, vol. 9, no. 4, 2023, doi: 10.1016/j.joitmc.2023.100159.
- [4] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia,” *Indonesian Treasury Review*, 2020.
- [5] P. M. Penggalih et al., “Village Funds in Indonesia: Impacts on Sustainable Agricultural Development,” *BIO Web of Conferences*, vol. 69, 2023, doi: 10.1051/bioconf/20236904028.
- [6] R. Priyanti and B. D. Pamungkas, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Perdesaan.”
- [7] A. Sujito and M. Ghofur, “The Nurturing Food Sovereignty from the Peripheral Side: The Village Law and the Soul of Agriculture in Rural Development in Indonesia,” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, vol. 10, no. 3, pp. 305–316, 2023, doi: 10.22500/10202243672.
- [8] X. Duanmu, J. Yu, X. Yuan, and X. Zhang, “How Does Digital Infrastructure Mitigate Urban–Rural Disparities?,” *Sustainability*, vol. 17, no. 4, 2025, doi: 10.3390/su17041561.
- [9] S. D. Mambu, V. A. J. Masinambow, and A. O. Niode, “Pengaruh Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Tani (Studi Kasus: Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan).
- [10] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta, Indonesia, 2018.
- [11] M. Mukhlis and R. Perdana, “A Critical Analysis of the Challenges of Collaborative Governance in Climate Change Adaptation Policies in Bandar Lampung City, Indonesia,” *Sustainability*, vol. 14, no. 7, 2022, doi: 10.3390/su14074077.
- [12] A. Nababan, A. G. Kumenaung, and S. Y. L. Tumangkeng, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 24, no. 7, 2024.
- [13] P. Ananta, “Ketimpangan Ekonomi Wilayah di Indonesia: Perspektif Analitis Pengaruh Ekonomi, Infrastruktur dan Demokrasi,” vol. 3, no. 2, 2025, doi: 10.23960/efebe.v3i2.251.
- [14] I. O. Wijayanti, H. Herawansyah, D. A. Putra, and B. Utomo, “Mitigating Village Fund Fraud in Indonesia: The Role of Leadership, Transparency, and Community Engagement,” *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, vol. 7, no. 6, pp. 1922–1935, 2025, doi: 10.37275/oaijss.v7i6.284.
- [15] K. Koriyawati, N. Sholicah, W. Widyawati, and D. P. W., “Evaluasi Program Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lebeteng Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal,” *Jurnal Sadewa*, vol. 3, no. 3, pp. 48–65, 2025, doi: 10.61132/sadewa.v3i3.1956.
- [16] D. V. B. Hans and N. S. Krishna Sastry, “The Role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Promoting Inclusive Growth and Sustainable Development in Karnataka,” *International Journal of Managerial Studies and Research*, vol. 13, no. 2, pp. 26–35, 2025, doi: 10.20431/2349-0349.1302003.
- [17] R. Ridwan and R. Manduapessy L., “474-Article Text-1854-1-10-20240430,” 2024.
- [18] A. A. N. G. W. and D. A. Iskandar, “Dampak Dana Desa terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Regional di Indonesia,” *Journal of Regional and Rural Development Planning*, vol. 7, no. 2, pp. 138–150, 2023, doi: 10.29244/jp2wd.2023.7.2.138-150.

- [19] M. Rizki and O. Erza, "Pengaruh Realisasi Transfer Dana Desa terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 62 Kabupaten di Indonesia," *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol. 2, no. 4, pp. 97–108, 2024, doi: 10.61132/moneter.v2i4.901.
- [20] A. Silvianita et al., "Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Mengoptimalkan Potensi Desa dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Desa di Kabupaten Tasikmalaya," *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, vol. 4, no. 2, 2023, doi: 10.24198/sawala.v4i2.
- [21] E. I. Gaut, E. Leha, and P. Luciany, "Pengaruh Kebijakan Dana Desa dan Pembangunan Ekonomi terhadap Infrastruktur Perdesaan di Desa Ria Raja Kecamatan Ende," *Jurnal Equilibrium*, vol. 2, no. 2, pp. 36–42, 2022.
- [22] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Terusan Nunyai dalam Angka 2023, Lampung Tengah, Indonesia, 2023.
- [23] A. Ambya, F. Fitriani, M. Zaini, and I. A. Bellapama, "Sektor Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Regional Lampung," *Journal of Food System and Agribusiness*, pp. 102–111, 2022, doi: 10.25181/jofsa.v6i1.2580.
- [24] A. Samsir, "Analysis of the Effectiveness of Village Fund Management in Bone District, South Sulawesi," *PINISI Discretion Review*, vol. 5, no. 2, pp. 455–462, Mar. 2022, doi: 10.26858/pdr.v5i2.33650.
- [25] Z. Denan, Z. A. Munir, R. A. Razak, K. Kamaruddin, and V. Pandiyan Kaliani Sundram, "Adoption of technology on E-learning effectiveness," *Bull. Electr. Eng. Informatics*, vol. 9, no. 3, pp. 1121–1126, Jun. 2020, doi: 10.11591/eei.v9i3.1717.
- [27] I. Dewi, "Effectiveness of Village Funds for Economic Development and Infrastructure of Bonto Jai Village, Bissappu District in Bantaeng Regency." [Online].
- [28] S. N. Sari and M. F. Abdullah, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kota Batu," *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 3, no. 3, 2019.
- [29] P. Agustina, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro," vol. 2, no. 2, 2019.
- [30] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya, 2019.
- [31] F. Handoyo, A. Hidayatina, and P. Purwanto, "The Effect of Rural Development on Poverty Gap, Poverty Severity and Local Economic Growth in Indonesia," *Jurnal Bina Praja*, vol. 13, no. 3, pp. 369–381, 2021, doi: 10.21787/jbp.13.2021.369-381.
- [32] A. Ratih, T. Gunarto, and A. Murwiati, "Is Multidimensional Poverty Different from Monetary Poverty in Lampung Province?," pp. 202–208, 2023, doi: 10.2991/978-2-38476-064-0\_22.
- [33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2021.
- [34] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2014.
- [35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2021.
- [36] A. Moser and I. Korstjens, "Series: Practical Guidance to Qualitative Research. Part 3: Sampling, Data Collection and Analysis," *European Journal of General Practice*, vol. 24, no. 1, pp. 9–18, 2018, doi: 10.1080/13814788.2017.1375091.
- [37] A. J. Bingham, "From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis," *International Journal of Qualitative Methods*, vol. 22, 2023, doi: 10.1177/16094069231183620.
- [38] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2014.
- [39] H. Wahyudi and S. N. Khotimah, "Pengaruh Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung," *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 45–57, 2022, doi: 10.35912/sekp.v1i1.1423.
- [40] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Indonesia: Andi, 2018.
- [41] R. Moniyana, "Analysis of Leading Sectors Supporting Tourism Using Location Quotient and Shift-Share in East Nusa Tenggara (2018–2022)," vol. 2, no. 3, pp. 338–347, 2024, doi: 10.5281/zenodo.13629069.
- [42] G. Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta, Indonesia: PT Pustaka CIDESINDO, 2021.
- [43] N. G. Mankiw, *Macroeconomics*, 9th ed. New York, NY, USA: Worth Publishers, 2016